KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 2 1 4				H.4 X Final	
									<u> </u>
A. IDE	NTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	AN YANG	DIPOTONG					
A.1 NP	A.1 NPWP : 5 7 0 4 5 4 8 1 9 7 2 2 0 0 0								
A.2 NII	A.2 NIK :								
A.3 Na	Nama : HENY ANDASARI								
B. PPh	PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	4	21-402-01		7.990.000	7.990.000	0	5	399.500	
Keterar	ngan Kode C	Objek Pajak : H	onor dan	Imbalan Lain yang D	ibebankan kepada APBN atau	APBD yang Dite	rima oleh PN	IS, Anggota	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022									
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy									
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomor: Tanggal dd mmyyyy								Уууу	
В.10									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
_									
C. IDE	NTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1	NPWP Instar	nsi Pemerintah :	9 5	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3	.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4	.4 Tanggal :		0 4	0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :			RIANI	RIANDY					
C.6 I	Pernyataan \	Najib Pajak :		n ini saya menyatakan b angani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
				i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	ı berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

1ED9WSZD